

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Perusahaan melakukan penilaian tingkat kesehatan perusahaan mengacu pada peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan badan usaha milik negara. Tingkat kesehatan Perusahaan dinilai berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh Kementerian BUMN.

Ringkasan Tingkat Kesehatan Bio Farma (Konsolidasi) 2024

Jenis Pemeringkatan	Tahun 2023 (audited)	Tahun 2024 (audited)
Peringkat Berdiri Sendiri (Stand Alone Rating)	A	A / Negatif
Peringkat Akhir (Final Rating)	AA / Negatif	AA / Negatif
Klasifikasi	Sehat	Sehat
Perusahaan Pemeringkat	PEFINDO	PEFINDO
Tanggal Terbit	10 Juli 2024	16 Juli 2025
Nomor Dokumen	RTG-280/PEF-DIR/VII/2024	RTG-251/PEF-DIR/VII/2025

PROSPEK USAHA

Perekonomian global pada 2025 masih dihadapkan dengan meningkatnya risiko dan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi di negara maju yang dibayangi oleh inflasi, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Eropa, fragmentasi geo-ekonomi, kebijakan perdagangan yang masih perlu dicermati dan tingginya nilai tukar dolar Amerika. Berbagai tantangan tersebut membuat makin pentingnya upaya pengendalian inflasi, konsolidasi fiskal, koordinasi

kebijakan moneter dan fiskal, serta komunikasi kebijakan guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. IMF dalam *World Economic Outlook* - Januari 2025, memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan mulai meningkat menjadi 3,3% atau sedikit meningkat dari prediksi capaian 3,2% di 2024.

Mengacu pada kondisi perekonomian global tersebut Pemerintah Indonesia memprakirakan aktivitas perekonomian nasional akan terus meningkat, sebagaimana disampaikan dalam RAPBN 2025, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,2% (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan perekonomian diperkirakan masih akan bertumpu pada lima lapangan usaha seperti pada tahun 2024, yaitu: industri pengolahan (18,98%), perdagangan (13,07%), pertanian (12,61%), konstruksi (10,09%) dan pertambangan (9,15%). Aktivitas manufaktur yang dicerminkan oleh *Purchasing Managers Index* (PMI) mengindikasikan sektor tersebut terus berekspansi. Kebijakan yang diberlakukan antara lain tetap mendorong pembangunan infrastruktur dan kemudahan iklim berinvestasi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi terhadap PDB Indonesia hingga sebesar 54,04% di tahun 2024, diharapkan tetap dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian. Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 mencapai 5,03% dengan penggerak utama bersumber dari peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Selaras dengan prakiraan pertumbuhan perekonomian global maupun nasional yang cenderung membaik, pertumbuhan permintaan produk, peralatan maupun jasa terkait dengan kesehatan secara global maupun nasional diyakini akan semakin meningkat. Terlebih tahun 2025 merupakan kelanjutan dari masa *recovery* dari kondisi pandemi global yang dinyatakan berakhir pada tahun 2022 lalu. Pada industri farmasi, disahkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diharapkan dapat mendorong perkembangan industri kesehatan nasional agar meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun global. Undang-undang tersebut juga menegaskan komitmen untuk menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global, serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemberlakuan Undang-undang No. 17/2023 membawa implikasi yang dapat memberikan kesempatan sekaligus tantangan kepada korporasi nasional di sektor kesehatan untuk berkembang dalam rangka menjalankan amanat dalam undang-undang tersebut, mencakup: